

Bahasa yang Direndahkan Oleh DADANG S. ANSHORI

Kita saat ini sedang dirisaukan oleh semakin menghilangnya identitas bangsa (*nation identity*) karena serbuan produk asing yang meresap melalui budaya dan gaya hidup (budaya populer). Kerisauan ini semakin serta merta ketika generasi muda kita menganggap perubahan yang terjadi dalam kebudayaan bangsa ini sebagai sesuatu yang wajar dan sebuah kemajuan karena yang mereka tiru adalah produk negara-negara maju, terutama Barat. Pendapat seperti ini bisa kita lihat dari komentar para selebritis muda terhadap tayangan film *Buruan Cium Gue* (BCG) ketika film ini mendapatkan kritik dan penentangan dari masyarakat dan tokoh-tokoh agama.

Pernyataan tokoh agama hanya dianggap angin lalu dan sesuatu yang klasik yang sering disampaikan kaum tradisional dan kolot. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan sebagai sebuah kemajuan peradaban. Bahkan pada tataran tertentu, moral dan agama akhirnya hanya dianggap sebagai batu sandungan yang menghambat kreativitas dan kemajuan. Kemajuan dipandang sebagai sesuatu yang terlepas dari nilai-nilai yang ada (nasional, lokal). Budaya yang lekat dengan muatan nilai akhirnya harus tercerabut dari akar budaya sendiri. Generasi muda macam ini biasanya tidak pernah membaca sampai dimana fase perjalanan kebudayaan Barat hingga ini?

Pemikiran serupa pernah terjadi ketika sains pada masanya dipertuhankan. Masa keemasan sains adalah ketika logika di atas segala-galanya. Ketika sains dipertuhankan dan kebenaran ada dipundak sains, agama dan moral dianggap sebagai penghambat kemajuan. Namun menjelang abad ke-19, paradigma berpikir tersebut mendapatkan pembuktian terbalik bahwa sains yang dilahirkan tanpa nilai hanyalah sumber petaka kemanusiaan, inspirasi terjadinya perang kemanusiaan, dan hancurnya kebudayaan manusia. Thomas Kuhn (1970) telah membuktikan kegagalan paradigma sains Barat yang bagi sebagian orang hingga kini dibanggakan melalui *The Structure of Science Revolution*. Bahkan setelah itu kita sempat menghadapi masa-masa “krisis paradigma” sains.

Kerisauan moral dan hilangnya jatidiri bangsa ini ternyata dialami juga oleh bangsa lain seperti Malaysia. Para tokoh akademisi di Malaysia mencoba melihat soal-soal yang menjadi akar kehancuran budaya Melayu. Mereka melihat selain persoalan “persaingan etnis” yang semakin mengeras melalui berbagai kepentingan politik dan ekonomi, persoalan “kebudayaan kebangsaan” pada gilirannya menjadi “perebutan” setiap etnis di Malaysia. Sesungguhnya persoalan ini klasik di permukaan bumi manapun manusia berada. Hanya yang paling menonjol adalah munculnya anggapan dari kalangan budayawan dan penulis Malaysia bahwa faktor bahasa sangat menentukan hilangnya budaya Melayu. Apabila bahasa Melayu lenyap maka kaum rantau ini tidak akan lagi memiliki identitas Melayu. Paling tidak kesimpulan ini muncul dalam diskusi penulis dengan Prof Abdullah Hassan, pakar bahasa Melayu di Kuala Lumpur Malaysia beberapa waktu lalu.

Bahasa rendah dan tinggi

Untuk kasus Malaysia, perlunya bahasa nasional menjadi media pembangunan kebudayaan nasional ditegaskan Menteri Kebudayaan Singapura dalam Forum Malayan Writer's Conference yang diselenggarakan Dewan Bahasa dan Kebudayaan Singapura

(1962). Rajaratnam mengatakan, *“a truly Malayan literature will emerge when writers express themselves through a language that is spoken and understood by all the communities. A common medium of expression will automatically create a Malayan literature.... It is only when the non-Malays begin to write in the national language, will Malay cease to be a medium for communal literature and become the vehicle for a Malayan literature.”* (Hassan, 2004).

Dalam masyarakat berbahasa ibu non-bahasa Inggris, ditemui semacam dikotomi antara bahasa budaya (*culture language*) dengan bahasa sains (*science language*). Di Indonesia dan Malaysia, misalnya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sering dipredikati sebagai bahasa budaya, sedangkan bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa sains, karena sebagian besar informasi dan ditulis dalam bahasa Inggris. Kategori seperti ini berlangsung lama, hingga kini, dan berakibat terjadinya “kasta bahasa” baik secara sosiologis maupun psikologis. Di Indonesia orang yang bisa berbahasa Inggris dipandang berstatus sosial lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Dalam posisi seperti ini, ada bahasa yang direndahkan dan ada bahasa yang ditinggikan. Bahasa-bahasa lokal atau nasional non-bahasa Inggris biasanya dipandang lebih rendah dibandingkan dengan bahasa Inggris. Fenomena seperti ini biasanya terjadi di negara-negara ketiga (miskin) di belahan benua Asia dan Afrika.

Mempertahankan bahasa Melayu di Malaysia selalu berkait dengan “kontrak sosial” yang pernah dilahirkan. Pidato Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak Hussein selalu dikutip untuk mengembalikan kontrak sosial tersebut. *“It is hardly necessary for me in this House to expound upon the careful and balanced character of the Constitution which was so painstakingly negotiated and agreed upon by the major races in Malaysia before we attained independence.... The basic provision relating to the acquisition of citizenship represented a fair and balanced compromise. The same careful and balanced approach runs through the other provisions of the Constitution protecting the legitimate rights of all races in Malaysia.... The provision of bahasa Melayu as the sole official and National Language is balanced by the guarantee for the use of the languages of other races other than for official purposes.”* (Hassan, 2004)

Demikian pula dalam Kongres Kebudayaan (1971) yang dibuka oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein ditetapkan tiga unsur utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan, yakni 1) Kebudayaan Kebangsaan Malaysia haruslah berasaskan kebudayaan asli rakyat rantau ini. 2) Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan. 3) Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan itu. Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini ditolak oleh kelompok etnis Cina yang merupakan suku terbesar kedua dan etnis India yang berjumlah sekira 7%. Mereka merasa tidak terwadahi kepentingan dan keberadaannya.

Di Indonesia barangkali “kontrak sosial” seperti ini hadir jauh lebih dulu, seperti peristiwa Sumpah Pemuda (1928) yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan “kontrak konstitusi” yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan (1945). Persoalannya, kebermaknaan dua rujukan ini dirasakan semakin mengendur seiring dengan menipisnya nasionalisme dan terformulasinya bentuk-bentuk lain kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Alih-alih bahasa Indonesia hanya dipandang sebagai alat berkomunikasi semata yang nilai sosialnya rendah.

Bagi bangsa Malaysia, bahasa bukan sekadar bahasa. Kontrak sosial sebagai bangsa benar-benar dijaga. Pemikiran-pemikiran liberal yang akan menghilangkan kontrak sosial ini akan ditentang dengan keras. Dalam pandangan kaum akademisi Malaysia, hancurnya karir politik mantan timbalan (wakil) perdana menteri Anwar Ibrahim karena ideologi liberal yang dibawanya dan dimungkinkan akan merusak “kontrak sosial” bangsa Melayu itu. Seorang pemimpin di Malaysia akan diterima masyarakat apabila memiliki dua latar pendidikan yang terintegrasi, yakni pendidikan formal (umum) dan pendidikan agama (pesantren). Oleh karena itu, nuansa keislaman dalam berbagai pidato para menteri atau pejabat Malaysia akan sangat terasa kental.

Dan yang paling penting dari komitmen bangsa Malaysia terhadap bahasa Melayu adalah karena bahasa menyimpan nilai-nilai di dalamnya yang hanya bisa dicerminkan apabila bahasa itu dipakai masyarakat. Sikap santun masyarakat dalam berbahasa terjadi karena bahasa tersebut “membawa” nilai-nilai di dalamnya. Bagi bangsa Melayu sangat tidak mungkin bahasa Inggris membawa nilai-nilai Islam. Apabila bahasa Melayu hancur berarti hancurlah kebudayaan Melayu dengan perangkat nilai yang ada di dalamnya. Komitmen ini yang tampaknya tak pernah kita gali dari bahasa lokal maupun nasional di Indonesia. Di masyarakat Sunda misalnya, bisa dipastikan hilangnya kehidupan yang santun, ramah, dan gotong royong karena lenyapnya bahasa dan budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari; bahasa Sunda jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari meskipun di keluarga. Bahasa baru yang ada di masyarakat membawa nilai baru yang mungkin saja bertentangan dengan nilai lama yang telah ada di masyarakat. Argumentasi inilah yang menyebabkan mengapa para ahli bahasa Melayu di Malaysia menentang dipakainya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah untuk bidang studi Matematika dan Sains.

Di Indonesia kesadaran akan kearifan lokal (*local genius*) muncul kembali seiring dengan runtuhnya formasi kebudayaan Orde Baru. Kesadaran-kesadaran ini muncul dan mengkristal pada pertanyaan format budaya mana yang akan dipakai dengan landasan kehidupan bermasyarakat. Ada semacam perasaan “keterjajahan” oleh budaya Jawa karena model budaya ini dipakai cukup lama sebagai acuan kehidupan kebudayaan di Indonesia. Kearifan ini menjadi sangat penting mengingat kita tengah dilanda krisis identitas sebagai bangsa dan sebagai suku bangsa. Formasi keindonesiaan atau kesundaan perlahan hilang karena orientasi global masyarakat yang terus bermimpi menjadi manusia Barat. Di saat nilai-nilai keindonesiaan dan kesundaan hilang dalam performansi perilaku kita, kita pun gagap menangkap hakikat budaya Barat secara utuh karena kerangka pemikiran dan orientasi yang berbeda. Akhirnya apa yang kita saksikan dalam panggung budaya saat itu tak lain adalah “keterjajahan baru” belaka.

Sebagai bangsa terbelakang yang hendak maju, kita dihadapkan pada dilema dua kaki yang harus menopang pada tempat yang berbeda. Kita perlu beradaptasi dengan kemajuan pada satu sisi dan tetap menjaga nilai yang mapan dalam kehidupan pada sisi lain. Sebagai bangsa yang hendak maju, bahasa Inggris perlu dikuasai tanpa harus menurunkan derajat bahasa Indonesia. Karena keberhasilan penguasaan teknologi tidak semata-mata faktor bahasa. Jepang adalah negara maju yang tetap berkiblat pada budayanya yang tercermin dalam bahasa Jepang. Inilah yang diinginkan ilmuwan bahasa Malaysia. Di kalangan mereka ada semacam teori bahwa apabila teknologi ingin dikuasai suatu masyarakat, maka teknologi tersebut harus disampaikan dalam bahasa masyarakat tersebut.

Bahasa Inggris bukan barang mewah dan bahasa Indonesia bukan barang loakan yang kalah bergengsi. Bahasa apa pun di dunia memiliki fungsi yang sama, sebagai alat berkomunikasi. Sebagai alat, keduanya perlu kita kuasai, namun kita tidak cukup berbangga dengan hanya menguasai alat. Kita juga harus menguasai informasi yang disampaikan di balik bahasa. Dengan demikian, tidak ada bahasa yang diinvasi oleh kekuatan bahasa Inggris. Demikian juga tidak ada bahasa yang direndahkan atau ditinggikan. Sekali lagi, Jepang dan India adalah dua negara yang berbeda dalam mendekati fenomena bahasa global ini. Kini, Jepang berjaya sekalipun penduduknya tidak banyak yang menguasai bahasa Inggris dan India tetap terbelakang sekalipun bahasa Inggris banyak dipakai dalam pergaulan masyarakatnya. Bahasa bukan esensi, penyerapan informasi dan teknologi adalah hal penting yang harus ditangkap. Dan ini tidak selalu harus dengan bahasa Inggris. Inilah yang hendak dikuatkan oleh para ahli bahasa Melayu. Bagaimana dengan kita?***

Penulis adalah dosen mata kuliah kebudayaan Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).